

ARTIKEL

**KESULTANAN BIMA PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ABDUL
HAMID 1767-1811**

***SULTANATE OF BIMA DURING THE REIGN OF THE SULTAN ABDUL HAMID
1767-1811***

MUHAMMAD AQIL



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018**



**KESULTANAN BIMA PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ABDUL
HAMID 1767-1811**

*SULTANATE OF BIMA DURING THE REIGN OF THE SULTAN ABDUL HAMID 1767-
1811*

MUHAMMAD AQIL

**Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Sejarah
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar**

Aqilbima367@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui (i) kondisi kesultanan Bima di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid; (ii) Dinamika Politik dan Kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan data dalam bentuk uraian atau penjelasan yang menekankan pada kejadian-kejadian peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan sejarah Sultan Abdul Hamid dengan teknik pengumpulan data yang ditempuh berdasarkan metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) kondisi kesultanan Bima dibawa pimpinan Sultan Abdul Hamid. Sepanjang masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim dan Sultan Abdul Hamid, hubungan Kesultanan Bima dengan Belanda masih dalam suasana tidak bersahabat. Dalam perdagangan, keduanya terus mempertahankan politik dagang bebas. (ii) dinamika politik dan kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid sadar, bahwa rakyat serta negeri yang dicintainya sedang dilanda berbagai tantangan, akibat politik *de vide et impera* Belanda pada masa pemerintahan ayahnya. Untuk mengatasi semua persoalan tersebut, Abdul Hamid harus berjuang keras. Hubungan dengan Makassar harus segera dipulihkan, pertahanan keamanan perlu ditingkatkan, perdagangan harus segera dibenahi seperti pada masa sebelumnya.

Kata Kunci: Masa Kesultanan Abdul Hamid

ABSTRACT

The study aims at discovering (i) the condition of the Sultanate of Bima under the leadership of Sultan Abdul Hamid, (ii) the dynamics of politic and power during the reign of Sultan Abdul Hamid. The study employed qualitative approach in which the data were of description which focused on the past events aligned with the history of Sultan Abdul Hamid. Data were collected based on history research method, namely heuristic, critique, and historiography.

The results of the study reveal that (i) the conditions of the Sultanate of Bima was under the leadership of Sultan Abdul Hamid. During the reign of Sultan Abdul Kadim and Sultan Abdul Hamid, the relations of the sultanate Bima and Dutch were still in unfriendly atmosphere. In trading, both parties keep maintaining a free trade policy, (ii) the dynamics of politic and power during the reign of Sultan Abdul Hamid, the Sultan Abdul Hamid realized that the beloved people and nation hit by various challenges due to the politic of de vide et impera of Dutch during the reign of his father. In order to solve all those problems, Abdul Hamid had to fight harder. The relation with Makassar should be immediately restored, security defense needed to be improved, trade should immediately be fixed as in previous times.

Keywords: Time of the Sultanate of Abdul Hamid

PENDAHULUAN

Kesultanan Bima sampai akhir masa kesultanan telah diperintah oleh 14 orang sultan dengan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai sultan terakhir. Pada masa sultan kedelapan, Abdul Kadim, tepatnya tanggal 9 Februari 1765 M Belanda memaksanya untuk menandatangani Kontrak Monopoli Dagang, sehingga Bima harus tunduk kepada politik monopoli dagang Belanda dan meninggalkan politik dagang bebasnya yang sudah dijalankan jauh sebelum Islam masuk. Sejak itu Bima tidak boleh berhubungan dengan bangsa lain dan hasil bumi harus dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat merugikan perkembangan ekonomi Bima selanjutnya. Sebelum perjanjian ini, sudah ada perjanjian-perjanjian antara Bima dengan VOC, namun dengan adanya perjanjian tahun 1765 ini semakin memperkuat posisi VOC di Bima dan berdampak besar bagi pemerintahan Abdul Hamid.

Adanya kegoncangan politik yang terjadi di lingkungan kesultanan pada masa Sultan Abdul Kadim telah mengundang campur tangan Belanda dan hal ini sangat merugikan Bima, sehingga menyebabkan Bima terjatuh dalam sistem monopoli. Ketika dalam kondisi seperti ini, Sultan Abdul Kadim wafat pada tahun 1773 M dan kekuasaan dilimpahkan kepada anaknya, Abdul Hamid. Pada saat Abdul Hamid naik tahta, Bima sudah satu abad di bawah kekuasaan Kompeni. Kontrol Belanda di bidang politik dan ekonomi berakibat Kerajaan Bima bukan lagi pusat perniagaan antarpulau di kawasan Indonesia Timur, sehingga kehilangan berbagai sumber kemakmuran. (Mawaddah, 2017).

Sultan Abdul Hamid adalah putera Sultan Abdul Kadim. Beliau dilahirkan pada tahun 1176 H (1762 M), mangkat pada tanggal 1 Ramadhan 1234 H (Juni 1819 M). Dimakamkan di halaman Masjid Kesultanan Bima. Setelah wafat digelari Mantau Asi Saniu, karena beliau bermukim di istana yang dihiasi dengan cermin.

Pada tahun 1187 H (1773 M), Abdul Hamid dilantik menjadi Sultan Bima, menggantikan kedudukan ayahnya. Pada saat itu beliau baru berumur 11 tahun. Untuk sementara waktu, tugas Sultan diserahkan kepada walinya Ruma Bicara Muhyiddin. Pada tanggal 18 Syawal 1219 H (10

Januari 1805 M), Ruma Bicara Muhyiddin diganti oleh Ruma Bicara Abdul Nabi.

Pada awal masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, kondisi dan situasi politik ekonomi Bima kurang mengembirakan. Timbulnya masalah tersebut disebabkan oleh dua faktor penting yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.

Faktor dari dalam yang menyulitkan posisi Bima pada masa Sultan Abdul Hamid adalah adanya kontrak dengan Belanda yang ditandatangani oleh Sultan Abdul Kadim pada tahun 1765. Kontrak tersebut pada hakekatnya mengikat Bima untuk menerima monopoli Belanda. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi Sultan Abdul Hamid yang berusia muda, dan yang belum memiliki pengalaman. Berhasil tidaknya Bima menangani masalah ekonomi dan sosial politik pada masa itu tergantung sungguh dari kemampuan Ruma Bicara Muhyiddin sebagai wali sultan.

Faktor luar yang ikut mempengaruhi situasi ekonomi dan sosial politik pada saat itu adalah tindakan Belanda yang selalu memaksakan kehendaknya kepada sultan dan raja-raja Indonesia untuk menerima hegemoni Belanda dalam perdagangan. Para sultan dan raja selalu dibujuk atau dipaksa untuk mengakui monopoli dagang Belanda melalui kontrak dagang. Hal ini amat menguntungkan Belanda dan amat merugikan para sultan dan raja-raja Indonesia.

Cara-cara menguasai kesultanan dan kerajaan Indonesia semakin teratur dan terorganisir. Karena sejak tahun 1808 kekuasaan Belanda di Indonesia bukan lagi dipegang oleh kompeni atau para pedagang, tetapi mulai dipegang dan diatur oleh pemerintah pusat yang berada di Belanda. Pada tahun 1808 pemerintah Belanda mengirim Jendral Herman Willem Daendels untuk menjadi Gubernur Jendral di Indonesia. Seorang Jendral bekas Panglima perang yang membantu Prancis melawan Inggris. Sudah barang tentu pemerintahan dilaksanakan dari tangan kompeni ke tangan Pemerintah Belanda akan menambah kesulitan bagi Sultan Abdul Hamid. Bima benar-benar memperoleh tantangan dalam bidang kehidupan (Ismail, 2004:117-119).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa keadaan Islam pada masa Sultan Abdul Kadim sangatlah menguatirkan dan hampir disemua daerah kekuasaannya timbul

pemberontakan akibat dari sikap sultan yang tidak tegas. Maka pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid ini segera dilakukan pembenahan untuk mengatasinya dan berusaha untuk mengembalikan suasana seperti keadaan semula. Sultan Abdul Hamid wafat dan dimakamkan dikuburan Raja-raja Kampung Sigi Bima. Dari tulisan yang ada di nisanya dapat diketahui bahwa Sultan Abdul Hamid wafat pada tanggal 20 Ramadhan 1234 H. Setelah memerintah hampir lima puluh tahun (1765-1811 M). Semasa menjabat sebagai Sultan beliau juga mendapat gelar Ruma Mantau Asi Saninu. (Salahuddin, Sulaiman & Abubakar. 2013:27).

Sebelum kompeni berhasil menaklukkan Makassar dan pulau Sumbawa, Bima berada di bawah kekuasaan Makassar, namun sifatnya sama sekali lain, berupa kontrol politik tetapi juga pertalian darah: kedelapan Sultan Bima pertama kawin dengan seorang putri Makassar. Abdul Hamid adalah sultan pertama yang tidak melakukannya, dia memperistrikan (antara lain) dua orang putri Sumbawa Harun al-Rasyid, yaitu Masiki Syafiatuddin dan Datu Sagiri. Fasal perkawinan itu merupakan salah satu akibat situasi politik yang baru: pertalian darah dengan Makassar tidak mempunyai makna lagi, bahkan Bima dan Makassar beberapa kali bersengketa tentang kekuasaan atas daerah Manggarai. (Chambert-loir, Dkk, 2010: 13).

Pada masa Kekuasaan yang terjadi pada Pemerintahan Sultan Abdul Hamid berbagai dinamika yang terjadi di Kerajaan Bima umumnya terbuka didunia luar dari segi ekonomi sebab perniagaan merupakan penghasilan utamanya, dan dari segi politik sebab keadaan negara tergantung pada keadaan kerajaan lain di Pulau Sumbawa dan sekitarnya. Pada tahun 1809 Gubernur Jason menulis:” Secara keseluruhan Pulau Sumbawa adalah sarang komplotan yang besar”, Penggulingan, perebutan tahta, pembunuhan, dan sekongkolan terjadi terus menerus. Ketiga Kerajaan Bima, Dompu, dan Sumbawa jarang berperang tetapi tidak berhenti berkomplot satu sama lain. Tambahan pula pemberontakan terhadap Komponi yang berasal dari kaum Bangsawan di Sulawesi Selatan mencari perlindungan di pulau itu. Bima mempertahankan kekuasaannya atas daerah Manggarai dan harus mengatasi pemberontakan

lokal serta melawan usaha dorongan oleh Makassar. Akhirnya hubungan dengan orang Belanda tentu saja sangat menentukan sejak perjanjian Bongaya ditandatangani, dan segala keputusan bersifat politik yang penting harus disetujui oleh Residen di Bima atau Gubernur di Makassar.

Kunjungan Sultan Abdul Hamid ke Makassar pada tahun 1792 merupakan contoh yang baik dari keadaan tersebut. Sultan berlaku sebagai raja bawahan terhadap gubernur, dan Gubernur memperlakukanya dengan sekaligus memperlihatkan kekuasaanya sendiri dan melimpahkan tanda persahabatan. Buat orang Belanda, yang terpenting ialah keamanan dan ketetapan. Di Makassar itu Sultan Abdul Hamid menerima surat dari Gubernur Jendral yang menyangkut masalah kehadiran orang Inggris di Sumbawa, yaitu sesuatu hal yang juga dipersoalkan oleh Gubernur Celebes, Boelen (1771) dan Vermeulen (1801). Begitu juga Gubernur pada waktu itu, yaitu W. Beth, mendesak Sultan supaya mengampuni Jeneli Sape yang pernah memberontak (Chambert-Loir, 2004: 234)

Rujukan yang dapat memberi petunjuk awal tentang Kronologi peran Kesultanan Bima, sebuah buku yang di sunting oleh M. Hilir Ismail (2004) berjudul *Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Buku ini menjelaskan beberapa tentang sejarah kesultanan Bima, tentang bagaimana dinamika sejarah Bima Dalam konteks Sejarah Kesultanan Abdul Hamid dalam Dinamika politiknya jarang diungkap. hal ini mungkin dikarenakan partisipasi pergolakan kekuasaan banyak bersifat lokal dan regional wilayah saja. Selain itu penulisan sejarah tentang Bima juga banyak dilatar belakangi oleh Nasionalisme sehingga tulisan-tulisan sejarah lokal tentang peran Kesultanan Abdul Hamid dalam dinamika politik nasional hanya menjelaskan secara singkat tentang sejarah Bima terutama dalam kesultanan. Dari sini penulis berusaha membuat tulisan dengan landasan historis lokal yang juga memaparkan karakteristik bagaimana Pemerintahan Sultan Abdul Hamid, sehingga selain pembaca bisa mengetahui Dinamika kekuasaan di Bima, pembaca juga bisa menilai sendiri bagaimana kondisi masyarakat Bima dalam kekhususan sesuai dengan penelitian saya

mengenai kesultanan Abdul Hamid. Tidak semua yang diceritakan dalam buku yang ditulis oleh M. Hilir Ismail ini dianggap mewakili zamanya, karena perlu mengacu dan mengumpulkan sumber yang lain untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang Kesultanan Bima pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid 1767-1811. M Hilir Ismail kurang menjelaskan secara utuh bagaimana peran Kesultanan Abdul Hamid dalam menyebarkan surat menyurat pada Belanda, serta bagaimana kondisi Bima dibawa kekuasaan Sultan Abdul Hamid bahwa Pada tahun 1800 kapal dagang Inggris mulai berdatangan di perairan Indonesia sehingga, kedudukan Belanda terancam oleh Inggris, yang berusaha melanggar monopoli dagang Belanda di Indonesia. Kehadiran Inggris semakin menyulitkan posisi Belanda di Indonesia. Gubernur Deandels mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Mei 1811, diganti oleh Gubernur Yanssen, dan itu masih dalam pencarian sumber apakah Belanda dan Inggris pernah ada konflik karena persaingan.

Rujukan Kedua, Henri Chambert-Loir, Massir Q. Abdullah, Suryadi Oman Fathurahman, H. Siti Maryam Salahuddin (2010), memberikan rujukan dalam sebuah buku yang berjudul *Imam Dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima* Dengan sampul unik berupa ilustrasi tanda tangan Sultan Abdul Hamid Muhammad, yang disalin dari naskah Perjanjian antara Kerajaan Bima dan Kompeni Belanda, 26 Mei 1792, buku ini menghadirkan tiga hasil telaah atas naskah-naskah yang berasal dari Kesultanan Bima, antara tahun 1775 sampai 1882. Para penulisnya: Henri Chambert-Loir, Massir Q. Abdullah, Suryadi, Oman Fathurahman, dan H. Siti Maryam Salahudin adalah mereka yang telah lama 'bercengkrama' dengan dunia pernaskahan Nusantara. Surat-surat itu menggambarkan upaya dan siasat diplomatik dari sang Sultan dalam rangka membina hubungan dengan Kompeni Belanda, selain juga menggambarkan produk ekspor Bima yang dijual kepada Belanda, barang-barang yang disalingtukarkan sebagai hadiah, serta secara umum gambaran ekonomi Kesultanan Bima yang justru kelihatan rapuh dan mudah tergoncang

Buku ini memberi arti penting yang menggambarkan kontruksi sejarah para

penguasa. Segi yang luput dari perhatian adalah tidak memberi ruang bagi arus bawah untuk memberi arti bagi perjalanan sejarah negerinya sendiri dan sangat sedikit perhatian pada interaksi sosial, politik, dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Hampir semua pelaku sejarah diperankan oleh para bangsawan, elite-elite politik yang berpengaruh, dan pejabat-pejabat istana.

Dalam tulisan Gubernur Jason tahun 1809, dibuka yang tulis oleh Henri Chambert-Loir, Massir Q. Abdullah, Suryadi Oman Fathurahman, H. Siti Maryam Salahuddin, Secara keseluruhan Pulau Sumbawa adalah sarang komplotan yang besar”, Penggulingan, perebutan tahta, pembunuhan, dan sekongkolan terjadi terus menerus. Ketiga Kerajaan Bima, Dompu, dan Sunbawa jarang berperang tetapi tidak berhenti berkomplot satu sama lain. Tambahan pula pemberontakan terhadap Komponi yang berasal dari kaum Bangsawan di Sulawesi Selatan mencari perlindungan di pulau itu. Bima mempertahankan kekuasaannya atas daerah Manggarai dan harus mengatasi pemberontakan lokal serta melawan usaha dorongan oleh Makassar. Hal ini melibatkan seorang bangsawan sehingga dianggap penting dicatat. Terjadi pemberontakan yang melibatkan tiga kerajaan langsung, Kerajaan Bima, Dompu dan Sumbawa ditambah lagi di tambah lagi kaum Bangsawan yang mencari perlindungan di Bima, hal ini mendorong penulis untuk meneliti bagaimana sebenarnya kondisi Pemerintahan Sultan Abdul Hamid , sehingga menimbulkan perhatian supaya mendorong untuk mencari sumber-sumber mencatat secara detail mengenai peristiwa ini.

Rujukan Ketiga, Tulisan yang berkaitan dengan aktifitas Raja dan Sultan Bima yang ditulis oleh Hj. Siti Maryam R. Salahuddin, Mumawar Sulaiman dan Syukri Abubakar yang berjudul *Aksara Bima Peradaban Lokal Yang Hilang*, (2013), dengan melihat keadaan Islam pada masa Sultan Abdul Kadim sangatlah menguatirkan dan hampir disemua daerah kekuasaannya timbul pemberontakan akibat dari sikap sultan yang tidak tegas. Maka pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid ini segera dilakukan pembenahan untuk mengatasinya dan berusaha untuk mengembalikan suasana seperti keadaan semula, dalam tulisan buku ini kurang

lengkap pembahasan mengenai keadaan politik yang terjadi dalam kesultanan Abdul Kadim, sehingga sampai ke anaknya yaitu Sultan Abdul Hamid. Dari tulisan ini memberi pemahaman tentang keadaan politik pada masa kesultanan Abdul Kadim selaku ayahnya Sultan Abdul Hamid tetapi juga menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Rujukan Empat, Hj. Siti Maryam R. Salahuddin yang berjudul *Hukum Adat Undang-undang Bandar Bima* (2004), telah menambah pengetahuan kita tentang Bima yang mengenai informasi sejarah Kesultanan Bima pada masa yang lampau khususnya keadaan pada waktu abad ke 16 sampai abad ke 19. Dari naskah-naskah Bima sisa peninggalan Sultan Bima terakhir, Muhammad Salahuddin, yang masa pemerintahannya tahun 1915-1951, dapat diketahui perjalanan sejarah Kerajaan Bima yang berawal dari kira-kira abad ke-14, Sayangnya, informasi tentang periode awal ini sangat sedikit. Akan tetapi, dari catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang setiap kali diperbaharui dari abad ke abad dan kini tersimpan dalam bentuk buku-buku catatan dan naskah-naskah lepas, dapat diketahui betapa para pendahulu kita berupaya menjalankan perannya di tengah-tengah kehidupan negerinya maupun dalam hubungan dengan negeri luar, Dalam memperlihatkan adanya informasi penting awal terjadinya Kesultanan Bima sehingga menambah wawasan dan menjadi rujukan bagi peneliti untuk mengisi beberapa bagian yang kurang disoroti sehingga sejarah Kesultanan Bima pada masa Pemerintah Sultan Abdul Hamid.

Rujukan Kelima, Buku yang ditulis oleh Henri Chambert-Loir, yang berjudul *Kerajaan Bima Dalam Sastra dan Sejarah* (2004), dalam buku ini menjelaskan Kunjungan Sultan Abdul Hamid ke Makassar pada tahun 1792 merupakan contoh yang baik dari keadaan tersebut. Sultan berlaku sebagai raja bawahan terhadap gubernur, dan Gubernur memperlakukanya dengan sekaligus memperlihatkan kekuasaanya sendiri dan melimpahkan tanda persahabatan. Buat orang Belanda, yang terpenting ialah keamanan dan ketetapan. Di Makassar itu Sultan Abdul Hamid menerima surat dari Gubernur Jendral yang menyangkut masalah kehadiran orang Inggris di Sumbawa, yaitu sesuatu hal yang juga dipersoalkan oleh Gubernur Celebes, Boelen

(1771) dan Vermeulen (1801). Begitu juga Gubernur pada waktu itu, yaitu W. Beth, mendesak Sultan supaya mengampuni Jeneli Sape yang pernah memberontak. Tapi buku penjelasan mengenai Sultan Abdul Hamid belum Lengkap dan terperinci, namun buku ini telah memberi sumbangan bagi penulis.

Adapun tujuan dari penulisan ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi kesultanan Bima di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid.
2. Untuk mengetahui Dinamika Politik dan Kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini, termasuk dalam kategori penelitian historis (penelitian sejarah), karena berkenaan dengan analisis logis terhadap peristiwa-peristiwa dimasa lampau berdasarkan sumber-sumber.

Penelitian historis bertujuan mengontruksikan objek yang telah terjadi pada masa lampau secara sistematis dan objektif, dan mengkaji bagaimana kaitanya dengan kondisi masa kini. Objek yang di maksud bisa berupa benda-benda historis, peristiwa-peristiwa historis, gejala-gejala atau hubungan-hubungan yang berdimensi historis. Rekonstruksi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan menyintesis bukti-bukti yang berkaitan dengan objek historis tersebut. (Mustami, 2015: 79).

Menurut Riyanto (1996:22), bahwa penelitian sejarah merupakan Exspost factor yang dinaungi oleh penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2007:60), Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sejalananya Sukmadinata bahwa penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).

Selanjutnya metode sejarah menurut Kuntowijoyo (2003:209), dalam metode sejarah

yaitu mengubah sejarah sebagai *humanity* dengan pendekatan *hermeneutics* (menafsirkan) yang memahami (*understand, verstehen*). Untuk menjadi sejarah yang menerangkan (*explain, verklaren*). Memahami seseorang berarti mengerti “dari dalam” berdasar makna subjektif” dan menerangkan dari luar dengan menggunakan ilmu (hubungan-hubungan kausal).

Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang disajikan pada penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data dalam bentuk uraian atau penjelasan yang menekankan pada kejadian-kejadian peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan sejarah Sultan Abdul Hamid.

2. Sumber data pada penelitian ada dua, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Menurut Abdurahman, (2007: 65) sumber Primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen, misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan pemerintahan atau organisasi massa. Jadi sumber data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh seorang peneliti, dengan melakukan pengambilan data dalam bentuk dokumen seperti arsip-arsip yang berkaitan kajian penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, yaitu data yang diperoleh instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang untuk mempublikasikan data. Data sekunder diperoleh dari koran, majalah, dan buku.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh berdasarkan metode penelitian sejarah yaitu heuristik diawali dengan studi kepustakaan. Prosedur semacam ini juga dikenal dengan teknik dokumentasi yakni membaca koleksi Museum Yayasan Samparaja dan para peneliti lokal Daerah Bima yang mempunyai pengetahuan mengenai hal yang teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan metode penelitian sejarah yaitu heuristik, diawali dengan studi kepustakaan. Prosedur

semacam ini dikenal teknik dokumentasi yaitu membaca koleksi Museum Samparaja, koleksi pribadi yang dimiliki oleh masyarakat, dokumen pemerintah, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian serta makalah-makalah lainnya. Sumber-sumber tersebut dicatat dan digandakan (foto kopi).

Data dalam bentuk lisan diperoleh dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat diteliti oleh penulis. Hasil dari wawancara selain dicatat pada saat proses penelitian sedang berlangsung juga direkam dengan menggunakan tape recorder. Tujuan dari pengadaan sumber tertulis dan perekaman dari sumber lisan yang telah diperoleh adalah untuk memudahkan bagi peneliti dalam melakukan pengecekan kembali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selain itu, juga dilakukan pendokumentasian terhadap objek sejarah baik objek sejarah kerajaan Bima maupun sejarah kerajaan Gowa sehingga dapat memperkuat dalam penelitian ini. Kegiatan pendokumentasian ini menggunakan kamera dan dilakukan sendiri oleh peneliti, semua teknik yang digunakan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena masing-masing saling melengkapi dan mendukung dari penelitian ini.

Dalam pembahasan terdahulu telah dipaparkan tentang sumber-sumber sejarah, terutama dilihat dalam kategorisasi sumber itu berdasarkan bahannya. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Teknik dimaksud dinamakan *heuristik*, yaitu berasal dari kata Yunani *heuriskein*, yang artinya memperoleh. Menurut G.J. Renier (Abdurahman, 2007:64), *heuristik* adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, *heuristik* itu, *heuristik* tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. *Heuristik* seringkali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memerinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.

Tahap *heuristik* ini banyak menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. Ketika kita mencari dan mendapatkan apa yang kita cari maka kita akan merasakan seperti menemukan” tambang emas”. Tetapi jika kita setelah bersusah payah kemana-mana (didalam

negeri maupun luar negeri) ternyata tidak mendapatkan apa-apa, maka kita bisa "frustasi". Oleh sebab itu sebelum kita mengalami yang berakhir ini, kita lebih dahulu menggunakan kemampuan pikiran kita mengatur strategi: di mana dan bagaimana kita akan mendapatkan bahan-bahan tersebut; siapa-siapa instansi apa yang dapat kita hubungi; berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk berjalan, akomodasi kalau ke tempat-tempat lain, untuk foto kopi, informan, dll. (Sjamsuddin, 2007:67-68).

Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu menguji dan menganalisis rekaman, peninggalan serta peristiwa pada masa lampau. Teknik ini memungkinkan untuk melakukan eksplorasi konsep-konsep yang boleh jadi hilang esensinya bila dilakukan dengan pendekatan lain. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa, untuk melihat gambaran tentang proses Sejarah Bima dalam Kesultanan Abdul Hamid.

Dalam pengolahan data serta analisis data penulis menggunakan tiga macam metode, karenanya untuk mencapai apa yang diinginkan, maka penulis mengolah data yang selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan dalam penulisan ini. Metode penulisan yang digunakan dalam menganalisis data tersebut sebagai berikut:

- a. Metode *induktif*, menganalisis data yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya mengambil kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.
- b. Metode *deduktif*, yakni analisis data yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode *komparatif*, yaitu metode yang memecahkan masalah yang membandingkan antara satu data dengan data yang lain, dan kemudian menarik suatu kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bima Dalam Catatan Sejarah

Daerah Bima atau Dana Mbojo telah mengalami perjalanan sejarah panjang dan berliku. Daerah yang terhampar di ujung timur Pulau Sumbawa ini telah mengalami fase sejarah yang diawal Zaman Naka, Zaman Ncuhi, Kerajaan, Kesultanan, Swapraja, Swatarta, Daerah tingkat II Kabupaten, hingga saat ini dimekarkan menjadi dua daerah otonom yaitu Kota Bima dan Kabupaten Bima (Malingi dan Ismail, 2014: 1).

Dalam perjalanan sejarahnya, "dana Mbojo" terus berkembang dipimpin oleh Raja-raja hingga tahun 1620 Masehi. Kemudian ketika Raja Bima ke 27 memeluk Agama Islam, gelar raja berubah menjadi *Sultan*. Sejalan dengan itu, orang Bima terus berkembang terpecah di berbagai kampung, dipimpin oleh Sultan-sultan yang beragama Islam semenjak tahun 1620 sampai 1951.

Sultan pertama bernama Abdul Kahir memerintah tahun 1620-1640, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama *Abdul Khair Sirajuddin* yang bergelar Mantau Uma Jati memerintah lebih kurang 42 tahun (1640-1682).

Sultan ini mempunyai kedudukan yang sangat menentukan meletakkan dasar filosofi pemerintahan sekaligus sebagai mandataris rakyat juga sebagai "*Pengayom dan pelindung rakyat*". Dalam istilah adat Bima disebut "**Howo ro Ninu**" yang harus mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau meletakkan dasar syarat-syarat bagi pejabat pemerintahan, yaitu "*taqwallah* (taqwa kepada Allah), *sidiq* (berkata benar), *amanah* (jujur), *tablig* (menyampaikan pesan), *cerdik dan pintar*".

Kondisi Geografis, Iklim dan Kependudukan Bima

1. Kondisi Geografis

Perkembangan perjalanan sejarah suatu bangsa, ikut dipengaruhi oleh keadaan geografis yang didiami oleh bangsa tersebut. Letak, luas wilayah, keadaan tanah dan iklim, saling mempengaruhi keadaan hidup dan kehidupan masyarakat.

Letak dan Luas Daerah Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur. Memiliki luas diperkirakan 4.870 km² atau 1/3 dari luas Pulau Sumbawa. Wilayah Bima sekarang ini mempunyai batas-batas berikut:

- Sebelah Barat, dengan Kabupaten Dompu

- Sebelah Timur, dengan Selat Sape
- Sebelah Utara, dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan, dengan Samudera Indonesia.

2. Keadaan Tanah dan Iklim

Hampir 70 % daerah Bima terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan. Pada masa lalu, ddataran tinggi dan pegunungan berpindah, maka akhir-akhir ini luas area hutan semakin berkurang. Dataran tinggi dan pegunungan sudah banyak yang gundul. Hal ini ikut mempengaruhi perekonomian masyarakat. Lebih karena timbul erosi yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Dari dataran rendah yang ada hanya 14% yang dapat dijadikan daerah pertanian. Sisanya merupakan daerah kering yang cocok untuk daerah peternakan, tetapi pada musim hujan dapat juga ditanami dengan jenis tanaman yang tahan panas seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian

Daerah Bima beriklim panas dan kering. Curah hujan amat sedikit, kalau dibanding dengan curah hujan di Indonesia Barat. Musim kemarau lebih panjang dari musim hujan. Sehingga daerah-daerah pertanian sering mengalami kekeringan (Isamil, 2004: 13-14).

Bima adalah sebuah daerah dibagian Timur Pulau Sumbawa dan salah satu daerah Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam lintasan peta bumi, Bima terletak pada posisi antara 8° Lintang Selatan dan 9° Lintang Selatan serta antara 118 derajat Bujur Timur dan 119 derajat Bujur Timur.

3. Kependudukan

Masalah penduduk tidak terlepas dari konteks biologi dan kebudayaan, sebab dalam prosesnya mahluk manusia mengalami peristiwa biologi seperti kelahiran, hidup, dan mati. Dengan demikian perlu pangan untuk hidup dan memproduksi dalam memperoleh keturunannya. Mahkluk manusia dalam lahir dan hidupnya ada dibawah pengaruh lingkungan sehingga perlu beradaptasi dengan hukum yang banyak ditentukan oleh kebudayaanya. Jumlah penduduk atau populasi ditentukan oleh, bahan pangan yang disediakan dan kematian. Meledaknya jumlah penduduk mengakibatkan berkurangnya bahan pangan, dan hal ini harus, disesuaikan, seperti bermigrasi ke wilayah lain yang

masih dapat memberi kebutuhan hidup (Soelaeman, 2011: 185-186).

Masa Kesultan Abdul Hamid

Sultan Abdul Hamid mewarisi tahta Kerajaan Bima dari almarhum ayahnya, Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah (1751-1773). Pada waktu itu Bima sebenarnya sudah berada dalam pengaruh VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie, Perusahaan Dagang Hindia Timur), yang sejak beberapa dekade sebelumnya sudah berusaha memasuki pulau Sumbawa. Pada 9 februari 1765 Sultan Abdul Kadim bersama lima raja lainnya dari Pulau Sumbawa menandatangani kontrak perjanjian dengan petinggi VOC di Makassar, Cornelis Sinkelar, mewakili atasanya di Batavia, Petrus Albertus Van der Parra (menjabat 1761-1775). Sukses itu dicapai VOC setelah beberapa kali berupaya masuk ke Bima untuk menanamkan pengaruhnya di Pulau Sumbawa. Sebelumnya, pada tanggal 8 Desember 1669 VOC yang diwakili Admiral Speelman menandatangani kontrak perjanjian dengan sultan Bima Abdul Khair Sirajuddin (1640-1682) akibat Bima ikut membantu kerajaan Gowa melawan VOC. Kerajaan Gowa di bawah pimpinan sultan Hasanuddin dikalahkan VOC dan akibat Bima dipisahkan secara politisi dari Gowa sebagaimana diatur dalam perjanjian Bongaya (1667). Dalam perjanjian tahun 1669 tersebut Bima ditekan untuk memberi konsensi kepada VOC untuk berdagang di wilayah kedaulatannya. Kontrak ini melempengkan jalan bagi Kompeni untuk melakukan penetrasi politik dan ekonomi lebih dalam lagi kerajaan Bima, seperti terbukti dalam perjanjian 1765 yang ditandatangani Sultan Abdul Kadim. Kontrak 1765 yang berisi 21 pasal itu semakin mengikat Bima: antara lain ditetapkan bahwa Bima dan kelima kerajaan tetangganya harus membantu VOC k jika berperang dengan musuh-musuhnya. Kontrak itu juga menyebutkan bahwa setiap pergantian Sultan di keenam kerajaan dipulau Sumbawa itu harus dilaporkan kepada Kompeni. Hal inilah yang di kemudian hari memaksa Sultan Abdul Hamid dalam usianya yang masih muda, harus berlayar bersama pengiringnya ke Makassar menghadang gelombang besar dan gosong-gosong karang di antara gugus Kepulauan Bala-Balakang/ kepulauan tengah dan liukang tengaya/ kepulauan sabalana di laut

Flores untuk mendapatkan pengesahan dirinya sebagai Sultan Bima yang baru dari Gubernur Celebes Willem Beth (Chambert-Loir, 2010: 121).

Belanda Berhasil Mengadu Domba Bima Dengan Makassar

Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim (1742-1773 M). Pada waktu itu yang menjadi sultan Makassar adalah Sultan Abdul Qudus dengan permaisurinya bernama Karaeng Ballasari. Karaeng atau nama Bimanya Kumala Bumi Partiga adalah saudara Sultan Abdul Kadim. Konflik terus berlanjut sampai dengan Amas Madinah keponakan Sultan Abdul Kadim menjadi Sultan Makassar.

Sultan Makassar Abdul Qudus dan dultan Amas Madina bermusuhan dengan Belanda. Mereka sangat menentang politik monopoli dagang Belanda. Sebaliknya Abdul Ali yang menjabat sebagai wali Sultan, bersikap lemah terhadap Belanda. Sultan Abdul Kadim ketika dilantik menjadi sultan pada tahun 1742M, usianya masih 13 tahun. Karena itu untuk sementara tugas Sultan dijalankan oleh wali Abdul Ali, merangkap sebagai Ruma Bicara (Perdana Menteri) dan Jeneli Rasana'e.

Kekuasaan Pedagang Belanda (VOC) Diganti Oleh Pemerintan Kolonial Belanda .

Kedatangan Belanda ke Nusantara secara langsung maupun tak langsung menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena nilai-nilai tradisional yang sudah mengakar kuat di Nusantara dikonfrontasikan dengan nilai-nilai modern yang dibawa Belanda, sehingga mulai muncul kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat. Terbentuknya kelas sosial baru akan melahirkan kesenjangan sosial, terutama antara orang-orang Eropa dengan penduduk lokal yang semakin mengerucut. Keadaan semacam ini menyebabkan timbulnya gerakangerakan protes dan pemberontakan, sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan kaum pergerakan terhadap apa yang terjadi pada masyarakat desa (Wirawan, 2011).

Setelah VOC dibubarkan tahun 1799, Bima berada dalam sistem administrasi pemerintah

Hindia Belanda di bawah kekuasaan Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden (Gubernur Sulawesi dan daerah-daerah bawahanya) yang berkedudukan di Makassar (Chambert-Loir. Dkk, 2010: 122).

Dinamika Politik dan Kekuasaan Sultan Abdul Hamid

Awal abad XVII merupakan saat yang amat penting bagi perkembangan sejarah Bima. Pada awal abad XVII terjadi dua peristiwa saling mempengaruhi perjalanan sejarah Bima, pada saat itu Salisi Ma Ntau Asi Peka melakukannteror kepada Raja dan Putra Mahkota, demi mewujudkan kepentingan pribadi berdasarkan ambisi dengan melanggar adat yang menjadi dasar dan falsafah hidup masyarakat. Pada waktu yang bersamaan pengaruh Islam dari Sulawesi Selatan mulai menyinari pesisir timur Sape, pesisir selatan Waworada, terus menelusuri dusun dan desa disekitar Gunung Lambitu, yang berpusat di Kalodu.

Kejayaan Kerajaan yang telah diperjuangkan dengan cucuran keringat oleh Raja Manggampo Donggo, Ruma Bicara Bilmana dan La Mbila, tidak dapat dipertahankan lagi. Kemelut politik berawal dari tindakan Salisi (Mantau Asi Peka) yang melakukan teror dan pembunuhan terhadap Jena Teke Mbora Di Mpori Wera dan Jena Teke La Ka'i, situasi istana dan kerajaan yang selama ini aman dan damai berubah menjadi suasana yang memilukan, darah dan air mata mewarnai situasi di istana. Para Ncuhi, pejabat hadat bersama rakyat dalam keadaan berkabung. Perasaan sedih dan khawatir merupakan perasaan umum pada saat itu.

Keadaan Politik Pada Masa Kesultanan Abdul Hamid.

Dalam perkembangan sejarahnya, Bima telah mengalami bermacam-macam bentuk dan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan tatanan masyarakat pada masing-masing zamanya. Sistem politik dan pemerintahan yang pernah tumbuh dan berkembang dalam sejarah Bima adalah:

1. Masa Naka
2. Masa Ncuhi
3. Masa Kerajaan
4. Masa Kesultanan

5. Masa Swapraja
6. Masa Swatantra
7. Masa Kabupaten Dati II (Ismail, 2004: 22).

Sistem dan Struktur Pemerintahan Bima

Setelah Sultan Abdul Khair Sirajudin putra Sultan Abdul Kahir sebagai sultan Bima yang ke-2, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, yang sebelumnya yang berdasarkan Hadat saja, berubah menjadi pemerintahan yang berdasarkan Hadat dan Syara'. Kesultanan yang berlaku berdasarkan Hadat dan Syara' ini berakuturun turun sampai dengan Sultan Bima ke-12 Sultan Ibrahim (1050 H-1336 H/1631-1917 M). Sementara pada masa pemerintahan Sultan Bima yang ke-13, tidak lagi berdasarkan Hadat dan Syara, tetapi berdasarkan Hadat dan Hukum Hindia Belanda, sebab Belanda mulai berdaulat atas wilayah Bima (Salahuddin Dkk, 2013:31).

Berdasarkan struktur organisasi pemerintahan di atas, pengungkapan posisi beberapa satuan organisasi dapat dilihat sebagai satu perangkat yang utuh. Berikut ini akan diungkap struktur organisasi lembaga "hadat". Bagan 1: sebelah kiri yang terdiri dari (1) kepala garuda yang menoleh ke kiri, melambangkan pemerintah atau lembaga "hadat", (2) 7 helai bulu sayap luar bermakna 7 orang Tureli dalam kabinet kesultanan Bima, (3) 5 helai bulu sayap kanan mengungkap asal-usul "dana Mbojo" yang terdiri dari lima bagian daerah. Sebelum pengislaman Bima terbagi 5 daerah Ncuhi Bolo (Bima barat), Ncuhi Mbanggapupa (Bima utara), Ncuhi Dara (Bima tengah), Ncuhi Dorowani (Bima timur), Ncuhi Parewa (Bima selatan), (4) 4 helai bulu ekor kiri mengungkap golongan masyarakat Bima yang tersusun atas golongan Raja-raja, bangsawan, tukang-tukang/pegawai istana, dan golongan rakyat biasa, dan (5) 2 helai bulu ekor pisah bagian kiri dan kanan melambangkan adanya unsur masyarakat yang terikat pada "hadat" dan "hukum" yang dikepalai oleh dua orang pengatur pangkat, dua orang anggota majelis "hadat" dan membawa aspirasi rakyat yakni Bima Luma Rasana'e dan Luma Bolo (Abdullah, 2004:134).

Sedangkan bagan ke 2 ialah rentangan ke sebelah kanan terdiri dari unsur-unsur, (1) kepala garuda yang mengadap kekanan melambangkan lembaga "hukum". Menurut

lambang itu hukum Islam yang dimaksud oleh pemerintah dan masyarakat Bima seperti yang terperinci sebagai berikut (2) 7 helai sayap luar melambangkan tujuh unsur ilmu fiqih, (3) 5 helai bulu sayap dalam yang melambangkan lima unsur yakni tiga bagian ilmu tauhiq, dan dua bagian ilmu tasawuf, (4) 4 helai bulu ekor melambangkan empat orang pembantu imam sebagai pelaksana hukum Islam yakni khatib tua, khatib karato, khatib lawili dan khatib to'i.

Bagian pokok yang ketiga ialah badan burung yang di dalamnya terdapat 35 helai bulu badan yang melambangkan dua hal: (1) tubuh garuda melambangkan diri sultan Bima dan (2) dalam arti sultan mengendalikan 35 jabatan dalam pemerintah (Abdullah, 2004:135).

Lambang Kesultanan Bima Tureli nggampo, tureli, dan para pejabat tinggi lainnya pada umumnya merupakan kerabat sultan. Kediaman mereka berada di sekitar istana. Rumah tureli nggampo berdiri di sebelah timur istana sultan, yang biasa disebut Asi Kalende yang sekaligus berfungsi sebagai kantor. Di sana, dengan menggunakan ruangan yang terbuka dengan pilar simbolis, para tureli duduk bersidang dan pada kesempatan ini tureli nggampo akan berada di sebelah barat kelompok itu, arah Mekah dan tempat tinggal leluhur mereka, Sang Bima.

Sebaliknya, dua bagian lain lebih banyak berurusan dengan masalah agama dan hukum. Salah satunya yang berpusat di mesjid agung, sebuah bangunan yang letaknya strategis antara dua istana, berurusan dengan hukum Islam mengingat bagian lain yang terletak di Kampung Dara, dipimpin oleh seorang ahli dalam bidang hukum adat. Tugas menengahi antara tiga bidang ini berada pada sultan, yang dianggap murni secara ritual dan karena itu tidak mungkin berbuat salah. Sebagai tanda kekuasaannya, pada saat upacara tertentu sultan mengenakan keris pusaka "Samparaja" sebagai simbol persatuan negara (Effendi, 2017: 194-195).

1. Hubungan Kesultanan Bima dengan kerajaan lain di Pulau Sumbawa

Sebelum ada pemberitaan-pemberitaan awal yang tertulis menurut legenda atau mitos semula di pulau Sumbawa memerintah seorang raja

yang berdiam dipedalaman pulau, yaitu Dompu. Raja ini membagi kerajaannya atas tiga bagian menurut jumlah putranya: putra tertua tetap memerintah di Dompu, putra kedua memerintah di Bima dan putra ketiga memerintah di Sumbawa (Sjamsiddin, 2013:72).

Pembagian Kerajaan-kerajaan ini tidak sama dengan pembagian bahasa daerah yang dipergunakan di pulau itu. Menurut bahasa-bahasa daerah yang dipakai, ada dua kelompok besar masyarakat: pertama bahasa Sumbawa (*basa samawa*) yang digunakan oleh orang-orang Sumbawa (*tau samawa*), dan yang kedua bahasa Bima (*Nggahi Mbojo*) yang digunakan oleh orang-orang Bima (*Dou Mbojo*) Dompu (*Dou Dompu*).

Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa adalah dua kesultanan yang paling besar di Pulau Sumbawa dilihat baik dari luas wilayahnya, jumlah penduduknya, maupun dari kecanggihan yang relatif struktur politik dan organisasi sosial tradisional masing-masing. Persamaan keduanya ialah kesamaan dalam agama, yaitu Islam meskipun masuknya agama ini dari arah yang berbeda: Bima dari utara (Gowa) dan Sumbawa dari barat (Jawa via Lombok) (Sjamsuddin, 2013: 97).

Selain itu Bima pun menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan Gowa dan Tallo. Kapan hubungan itu mulai berlangsung belum dapat ditentukan secara pasti. Dalam *Bo* kerajaan Bima disebutkan bahwa raja Bima, Manggampo Donggo belajar cara-cara mengendalikan pemerintahan yang kemudian berkembang menjadi tata hadat yang berlaku di kerajaan Bima dikemudian hari dari kerajaan Gowa. Sejak itu pula hubungan dengan kerajaan Gowa dan Tallo berlangsung hingga terjalin hubungan keluarga melalui perkawinan.

Kebanyakan manuskrip itu bertalian dengan sejarah setempat, malah merupakan sumber yang sangat penting tentang perkembangan politik kerajaan Bima, tentang susunan masyarakat dan adat istiadat, tentang pentadbiran dan hukum, serta tentang hubungan Bima dengan daerah sekitarnya. Manuskrip itu sarat dengan aneka ragam informasi yang amat berharga karena tidak terdapat dalam dokumen lain, dan informasi itu membuktikan Bima pernah menjadi pelabuhan dan sebuah ibu kota kerajaan

yang sangat giat dan ramai pada abad ke-15 sampai ke -18. Dalam periode itu Bima berhubungan dengan kerajaan-keajaan terpenting di Nusantara karena perniagaan, dan juga sebab perniagaan Bima menjadi makmur dan menerapkan berbagai unsur kebudayaan luar (Chambert-Loir, 2009: 33).

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Setelah Dewasa dijodohkan dengan Datu Sagiri Putri Sultan Sumbawa. Dari pernikahannya itu dikaruniai seorang putra bernama Ismail dan seorang putri bernama Siti Jamila Bumi Kaka (Alan dan Ismail, 2014: 39).

Pemerintahan Sumbawa maupun di Bima meskipun dengan struktur yang berbeda. Prinsipnya adalah sama, juga kedudukan sultan pada posisi tertinggi ia juga sebagai Khalifa dalam penegertian sebagai kepala negara dan kepala agama, setidaknya-tidaknya sebagai lambang pengikat (Sjamsuddin, 2013: 100).

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian yang telah dibahas sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut

1. Dari latar belakang Pada masa Sultan Abdul Hamid, Hubungan Kesultanan Bima dengan Belanda masih dalam suasana tidak bersahabat. Dalam perdagangan, keduanya terus mempertahankan Politik dagang bebas. Belanda berupaya keras untuk membujuk dan memaksa Sultan agar sultan mau menandatangani Kontrak dagang.
2. Dinamika Politik dan Kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, situasi politik ekonomi Kurang mengembirakan. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi Sultan Abdul Hamid yang berusia muda, dan yang belum memiliki pengalaman. Berhasil tidaknya Bima menangani masalah sosial politik ini dalam kepemimpinannya.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka melalui tulisan ini di sarankan kepada

1. Pemerintah untuk berlaku adil dalam mengambil suatu kebijakan untuk memperhatikan nilai dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

2. Di harapkan pengkajian tentang berbagai peristiwa yang lebih mendalam terkait kejadian-kejadian yang bersejarah supaya dapat diperkaya guna melengkapi sejarah nasional.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, agar menghimpun data terkait dengan kondisi sejarah Bima guna menambah wawasan dan gambaran yang lebih luas tentang Kesultanan Bima dalam Pemerintahan Sultan Abdul Hamid

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: AR-Ruzz Media
- Abdullah gani Abdul. 2004. *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*. Mataram: Lenge.
- Chambert-Loir Henri. 2009. *Pelayaran, Perdagangan dan Persaingan Kuasa Berdasarkan Manuskrip Undang-undang Bandar Bima*. Ding Choo Ming, Henri Chambert-Loir dan Titik Pudjiastuti, *Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Manuskrip Lama*. Bangi-Malaysia-Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA): Universiti Kebangsaan Malaysia.
- _____. 2010. *Iman dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Effendy, Muslimin A.R. 2017. *Diskursus Islam dan Karakter Politik Negara di Kesultanan Bima*. *Jurnal Al-Qalam Vol 23 No 2 Desember 2017*. (Makassar: Litbang Agama), ISSN: 0854-1221, E. ISSN: 2443-2288, hlm. 184197..
- Daliman. 2015. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak (Anggotalkapi)
- Ismail, M. Hilir dan Alan Malingi. 2014. *Profil Raja dan Sultan Bima*. Bima: Dinas Kebudayaan Pariwisata Bima
- _____. 2014. *Profil Raja dan Sultan Bima*. Bima: Dinas Kebudayaan Pariwisata Bima.
- _____. 2004. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Mataram: Lenge.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Mustami, Muh, Khalifah. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Aynat Publishing
- Salahuddin, Sulaiman dan Abubaka .2013. *Aksara Bima Peradaban Lokal Yang Sampai Hilang*. Mataram: Alam Tara Institute
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- _____. 2013. *Memori Pulau Sumbawa Tentang Sejarah, Interaksi Budaya dan Perubahan Sosial-Politik di Pulau Sumbawa*. Yogyakarta: Ombak.
- Soelaeman, Munandar. 2011. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Taamin, H. Jamil. 2014. *Orang Bima: Siapa, Kedatangan dan Keadaan di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Yapma.
- Wirawan, Wahyu. 2011. *Semaun Dalam Bayang-bayang Pemerintah Hindia Belanda 1819-1823*. *Jurnal*. Belanda: Nijmegen University Belanda. Volume 21 nomor 2 Juli 2011.